

Judul : Jibaku rakyat menolak revisi UU TNI
Tanggal : Jumat, 21 Maret 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Jibaku Rakyat Menolak Revisi UU TNI

Dengan tenda, anak muda mengawal sidang paripurna pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang. Pengesahan yang tak memenuhi aspirasi tidak mengurutkan perjuangan mereka menuntut tegaknya supremasi sipil.

Tak seperti hari-hari lainnya, kendaraan tidak bisa masuk begitu saja melalui Gerbang Pancasila, Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Jalan masuk kendaraan menuju kawasan kantor wakil rakyat itu terhalang tiga tenda yang didirikan sekelompok warga sejak dini hari, sekitar pukul 00.00.

Hingga pukul 09.30, ketiga tenda itu masih berdiri tegak. Salsa (26), salah satu warga yang ikut mendirikan kemah, sengaja bermalam bersama belasan kawan yang dikenalnya dari media sosial X setelah di-persatukan oleh tanda pagar (tagar), #TolakRUUTNI. Rencana itu bergulir spontan untuk mengawal revisi UU TNI yang pada hari itu akhirnya disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna.

Mereka sama-sama menolak revisi UU TNI disahkan menjadi undang-undang. Seperti diungkapkan Salsa, ia resah kemahilnya dwifungsi ABRI seperti terjadi di Orde Baru. Menurut dia, hal itu mengingkari semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil. Di sisi lain, ia menilai para aparat bersenjata itu tidak memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mengisi jabatan-jabatan sipil.

Keresahan yang sama juga diutarakan warga lainnya, Johan (32), yang sama-sama mendirikan tenda seperti Salsa. Hanya saja, ia sempat pulang sebentar ke rumah sebelum kembali lagi ke tenda.

Semestinya, menurut Johan, TNI mengisi pos-pos jabatan yang sesuai kompetensi mereka. Khususnya jabatan yang menyoal urusan keamanan. Dikawatirkan, pendekatan militeristik digunakan jika semakin banyak aparat bersenjata yang mengisi jabatan sipil.

"Apalagi, mereka punya senjata. Takutnya nanti juga disalahgunakan sewaktu memimpin. Biar jabatan-jabatan sipil diurus oleh sipil saja," kata Johan, yang sehari-hari berprofesi sebagai wirausaha.

Seperti halnya Salsa dan Johan, sejumlah orang yang mendirikan tenda di sekitar kompleks parlemen itu memiliki berbagai latar belakang, dari mahasiswa hingga pekerja. Mereka juga tidak mewakili komunitas tertentu. Hanya bersatu sebagai sesama warga yang memiliki keresahan.

"Semua terjadi begitu saja. Keresahan ini sudah ada sejak semalam sebelumnya. Jadi, ka-



Sejumlah warga duduk di depan tenda, di Gerbang Pancasila, Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Mereka menginap dan bertahan di lokasi itu sejak pukul 00.00. Aksi itu dilakukan sebagai penolakan atas rencana pengesahan revisi Undang-Undang TNI.

ni pikir, coba kami membalek saja jalan masuknya daripada terlewat," ujar Salsa.

Didatangi aparat

Bermalam di depan gerbang kantor wakil rakyat ternyata bukan hal mudah. Ada saja gangguan yang dihadapi Salsa dan teman-temannya. Mereka sempat didatangi aparat keamanan dan diminta berpindah lokasi kemah. Namun,

permintaan itu mereka tolak mentah-mentah.

Memang, tenda sudah berdiri. Bisa saja Salsa dan kawan-kawannya berbaring sejajar menanti digelarnya sidang pada pagi hari. Namun, mereka terlampau khawatir bakal kelewatan momen pengesahan RUU TNI. Alhasil, mereka juga sampai beberapa saat sebelum sidang dimulai.

"Semalaman kami mengobrol saja. Mau tidur juga tidak bisa. Pikirannya macam-macam," ucapnya.

Salsa pun menyinggung rapat pembahasan RUU TNI yang sempat digelar di hotel dan berlangsung secara di-

am-diam. "Tapi kami mau kebohongan lagi?" ujar Salsa.

Selama sidang paripurna pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang berlangsung, Salsa, Johan, beserta massa mahasiswa dan masyarakat sipil tekun mengikutinya lewat siaran langsung di Youtube.

Mengingkari reformasi

Suasana pun memanas saat mereka mendengar RUU TNI disahkan jadi undang-undang. Teriakan penolakan terlintar secara sporadis sembari mendekati gerbang besi yang telah tertutup rapat.

Sudah terjaga semalaman, Salsa dan teman-temannya merasa kembali kebobolan. Ia sangat menyayangkan keputusan DPR mengesahkan revisi itu. Menurut dia, hal itu mengingkari semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil. Lebih-lebih, aparat bersenjata memiliki mekanisme kepemimpinan yang mengandalkan komando terpusat.

"Jabatan sipil ini tidak bisa semata-mata lewat komando. Jang-jang-jang nanti tidak ada

dialog lagi. Kritik tidak didegunkan. Ruang kebebasan berekspresi semakin sempit," ucap Salsa.

Kendati sudah disahkan, Salsa tidak akan berhenti melawan. Sebisanya mungkin ia menuntut agar revisi UU TNI dibatalkan. Oleh karena itu, ia melanjutkan aksi bersama elemen masyarakat lainnya di area gerbang utama DPR.

Di lokasi itu, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi sudah lebih dahulu tiba, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Nasional, Trisakti, dan Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka (Uhamka). Mereka secara bergantian menyampaikan orasi. Bahkan, sewaktu hujan menguyur.

"Ternyata, bagi anggota DPR, suara masyarakat tidak lebih penting dari suara TNI. Jadi, sangat disayangkan pengesahannya yang sangat tergesa-gesa dan terkesan mengabaikan suara rakyat," kata Presiden HEM Uhamka Agus Salim, yang juga menjadi koordinator lapangan aksi.

Celakanya, sebut Agus, pemerintah juga terkesan selalu

membuat kontroversi. Berkali-kali mereka mengeluarkan kebijakan yang memicu perdebatan publik, lalu merevisinya seolah-olah seperti pahlawan. Rentetan persoalan itu mengakibatkan publik semakin geram. Gerakan masyarakat pun terbentuk secara natural.

"Terlalu banyak masalah yang muncul dari hari ke hari. Jangan salahkan kami sebagai masyarakat sipil untuk terus bergerak," kata Agus.

Tak berhenti bergerak

Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Faiz Nabawi Mulya menyampaikan, kesadaran bergerak dilatar oleh sejarah. Terlebih perjuangan tinggi tersebut termasuk salah satu yang memotori terjadinya reformasi. Beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi itu juga gugur menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

"Semangat itulah yang membuat kami, menjadi niat kami untuk tetap mengawal agenda-agenda besar dari reformasi," kata Faiz.

Memurut Faiz, pengesahan revisi UU TNI membuktikan bahwa DPR mengesampingkan hak-hak sipil. Sekolah rakyat tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan itu. Sebab, pengesahan tiba-tiba saja terjadi dalam rapat paripurna.

Dalam aksinya, Faiz memimpin agar pemerintah terus menganggarkan supremasi sipil. Jangan sampai dwifungsi ABRI terlahir kembali. Dikawatirkan, sistem pemerintahan militeristik akan mengusik jalannya demokrasi.

(NINO CITRA ANUGRAHANTO/
HILDAYAT SALAM/
MACHRADIN WAHYUDIT
RITONGAI)